

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004)
- Andrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998)
- \_\_\_\_\_. *Hilangnya Hak-Hak Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 1999)
- Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018)
- Chadidjah Dalimunthe, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, (Medan: FH USU Press, 2000)
- Daliyo, J.B, *et.al*, *Hukum Agraria I*, (Jakarta: PT. Prehallindo, 2001)
- Darwan Prints, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Gunanegara, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, (Jakarta: Tatanusa, 2018)
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, (Jakarta : Visimedia , 2011)
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014)

Philiphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

\_\_\_\_\_. *et.al*, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016)

\_\_\_\_\_. *Pengertian Pengertian Dasar Tentang Tindakan Pemerintahan (bestuurshandeling)*, (Surabaya: Djumali, 1985)

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)

SF Marbun, *Hukum Administrasi Negar*, (Yogyakarta: UIIPress, 2003)

Soerjono Soekanto, *et.al*, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

\_\_\_\_\_. *et.al*, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Bandung: Rajawali Pers, 2001)

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010)

\_\_\_\_\_. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012)

\_\_\_\_\_. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2019)

Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

## **JURNAL**

Gunanegara, “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah,” *Law Review*, Vol. XXI No. 3, Maret 2022.

Dian Kus Pratiwi, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2, 2017.

Novia Tika Febriana, Murry Darmoko A, Langkah hukum terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertipikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/b/2020/PT. TUN. SBY), *Universitas Bhayangkara Surabaya* Vol. 11 No.1, Desember 2022.

Wahyu Erwiningsih, Pranata Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah, *Jurnal Ilmu Hukum, FH UII Yogyakarta* Vol. 9 No. 2, 2006.

Satino Mulyadi, Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1, Juni 2019.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen  
Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan  
Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan  
Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat  
Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012  
tentang lampiran Akta Jual Beli.

## **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 30/G/2012/PTUN.Dps  
tertanggal 17 April 2023

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 119/B/2013/PT.TUN  
.Sby tertanggal 11 September 2013

Putusan Mahkamah Agung Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 33/PK/  
TUN/2015 tertanggal 22 April 2015